

BAB III

REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATRA PADA PERTENGAHAN ABAD XX

Zaman revolusi fisik (1945-1950) merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama revolusi hanya merupakan sedikit dasar sejarah.¹

7 Desember 1941 pukul 07.45 (waktu Hawaii) di hari Minggu pangkalan Amerika Serikat di Pasifik yaitu Pearl Harbour secara mendadak dibom oleh 183 pesawat-pesawat udara Jepang. Kalangan militer Hindia Belanda di Batavia masih belum sadar akan kegentingan situasi dan tetap mengharapkan bantuan dari Pacific Fleet. Senin 8 Desember 1941 pukul 3 dini hari telepon berdering dikamar tidur istana Gubernur Jenderal (GG) Hindia Belanda, Jongkheer Tjarda Van Starkenborgh Stachower, telepon berasal dari Kepala Dinas Penerangan Pemerintahan, dia melaporkan bahwa suatu siaran radio pribadi seorang Amerika memberitakan bahwa Pearl Harbour telah diserang Jepang. Pada jam-jam berikutnya orang mendengar berita tentang pemboman-pemboman di Siam, Malaka, Singapura dan Filipina.

Indonesia was divided into three regions by the Japanese. Sumatra was placed under the 25th Army, while Java and Madura were under the 16th

¹ Ricklefs, *op. cit.* 1991: 317.

Army; both of these were under the 7th Area Army with its headquarters in Singapore. Kalimantan and East Indonesia were controlled by the navy. Policies differed among these regions. In general, Java was perceived as the most politically advanced and least economically important area, its main resource being people. Japanese policies there stimulated nationalism very much more than in the other two regions, and the greater political sophistication of Java over other areas was thereby enhanced. Because of the significance of these developments for the future, Java has also received greater scholarly attention than the other islands. Sumatra was important for its strategic resources and only when Japan was on the brink of defeat were nationalist ideas encouraged there. The area under naval control was regarded as politically primitive and economically essential to Japan; it was governed in the most repressive manner of all.²

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia memproklamkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka. Zaman revolusi fisik Indonesia pun dimulai, perjuangan-perjuangan dilakukan lewat jalur perundingan maupun tindakan-tindakan revolusioner berupa konfrontasi langsung. Pihak-pihak yang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalah jalan keluar yang paling realistis agar Republik di akui secara de facto oleh dunia internasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sementara pihak lainnya seperti Jenderal Sudirman beranggapan bahwa berunding dengan Pemerintahan Belanda tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan Republik saja, tuntutan Merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan perjuangan revolusioner.

Sumatera di saat Proklamasi tersebut menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya, serta MR Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan gubernur³. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi dan memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga sub provinsi, yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Adapun berjalannya revolusi kemerdekaan di berbagai wilayah di Sumatra yaitu sebagai berikut:

² Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 247

³ D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, Jakarta : Kompas, 2003, hlm. 145.

1. Aceh

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, yaitu pada tahun 1941 dan awal tahun 1942, kebencian rakyat terhadap Belanda semakin bertambah memuncak yang walaupun Belanda telah berusaha dengan bermacam-macam cara untuk menghadapinya, namun rasa kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Hal ini akan terlihat dari berbagai kegiatan rakyat yang bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda baik yang merupakan perjuangan dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk kegiatan politik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang masih berkuasa. Kedua bentuk kegiatan ini dipelopori oleh para ulama dan *uleebalang*, yang kedua golongan ini mempunyai pengaruh cukup besar di dalam masyarakat Aceh.

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar Negeri guna memperoleh bantuan. Ke Semua kegiatan ini bertujuan memperoleh kembali kemerdekaan yang sudah demikian lama diperjuangkan. Kegiatan mengadakan rapat ini misalnya rapat rahasia pada bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Tengku (Tgk) Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab, yang kedua-duanya dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Teuku (T.) Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), T. Muhammad Ali, Panglima Poleh (Panglima Sagi XXII Mukim), T. Ahmad (ulee balang Jeunib — Samalanga). Rapat ini diselenggarakan di Lamnyong (rumah T. Nyak Arief) dengan mengucapkan ikrar bersama yaitu dengan bersumpah setia kepada agama Islam, bangsa dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah⁴

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh merupakan salah satu keresidenan dalam Provinsi di Sumatra. Residen yang pertama Teuku Nyak Arief, menjalankan pemerintahan bersama Komite Nasional Daerah pimpinan Tuanku Mahmoed. Dalam menjalankan tugasnya memang sangat berat menjalankan roda pemerintahan di tengah berkecamukannya revolusi kemerdekaan menyebabkan

⁴ Muhamad Ibrahim et.al, (1983). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 1

kondisi politik dan keamanan tidak kondusif karena masih adanya provokasi musuh. Jepang masih bersikap seperti biasa, tidak mau beranjak dari kantor-kantor yang selama ini ditempatinya. Alasannya, mereka menanti sekutu, pihak yang berhak untuk mengambil alih kedudukan mereka, keadaan tersebut dapat diatasi dengan kekerasan. Dengan pimpinan Teuku Nyak Arief, kantor pusat pemerintah daerah yang disebut Atjeh Syu Seityo Gunseibu dapat diambil alih, kemudian sengketa terjadi, namun tidak sampai terjadi pertumpahan darah.

Pemberitaan mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu dan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Aceh diterima agak terlambat. Dalam kaitan ini Alfian menguraikan sebagai berikut :

Berita menyerah kalahnya Jepang, baru pada tanggal 23 Agustus resmi diketahui rakyat, karena pada tanggal tersebut Atjeh Syu Tyokon (Residen Aceh) memanggil para pemimpin rakyat setempat ke kediamannya (Pendopo Gubernur sekarang). Dalam pertemuan itu S. Lino secara resmi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi daerah Aceh, dan posisi Jepang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintahan Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh.⁵

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 25 Agustus 1945 Tyokon S. Lino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh, yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan kemarahan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan sekutu. Pada tanggal 27 Agustus 1946 pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat selebaran di Kutaraja dan di kota-kota lain di Aceh. Selebaran tersebut ditujukan kepada penduduk Indonesia, dengan menyatakan bahwa perang telah selesai. Jepang telah mengaku tunduk dan tidak dengan perjanjian, dan ditutup dengan hiduplah Seri Ratu, Hiduplah.⁶

Sebenarnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terlambat diterima di Aceh karena Mr. T.M. Hasan dan DR. Amir pulang dari Jakarta sebagai utusan dari Sumatra Utara yang duduk dalam Panitia Persiapan

⁵ Teuku Ibrahim Alfian, (1982). *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*. Banda Aceh: Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, hlm. 67

⁶ Rusdi Sufi, et.al., (1997). *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950 di Aceh*. Jakarta: Depdikbud, hlm: 67

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terlambat tiba di Sumatra. Hal ini disebabkan karena sarana perhubungan, baik sarana transformasi maupun sarana telekomunikasi pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara Jepang.

Dalam konsultasi ini T. Nyak Arief setuju supaya bekas Gyugun dan Heiho dan Tokubestu dan lain-lainnya berkumpul dalam sebuah organisasi demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Sesuai dengan persetujuan tadi maka pada tanggal 27 Agustus 1945 dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama dengan API (Angkatan pemuda Indonesia) dan pada hakekatnya adalah Angkatan Perang Indonesia untuk seluruh Aceh bermarkas di Kutaraja dan sebagai ketua Sjamaun Gaharu (Komandan). T. Hamid Azwar sebagai kepala staf beserta Wakil Markas daerah di daerah-daerah seluruh Aceh.

Mengenai persiapan dan lain-lain pada mulanya belum dimiliki oleh API, maka untuk keperluan ini perlu dipersiapkan suatu rencana operasi khusus supaya senjata Jepang jatuh ke tangan API. Dengan peristiwa demi peristiwa terus berlangsung di Aceh sampai kepada perlawanan menghadapi Jepang, perlawanan menghadapi Belanda di Medan Area dan terus kepada penyerahan kedaulatan Indonesia secara resmi. Dimana rakyat Aceh tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia banyak berjasa dalam mempertahankan revolusi 1945.

2. Palembang

Sejak permulaan abad XVII sampai abad XX kerap kali timbul peperangan dan pemberontakan yang tidak berhasil karena jeleknya senjata kita dan baiknya taktik-taktik Belanda sehingga dapat mengalahkan kita.⁷ Beberapa perlawanan yang umumnya dikendalikan dari kota Palembang seperti di Musi Rawas, yang dikenal dengan Perang Kelambit, perlawanan di Komering Ulu, perlawanan di Karta Mulia dan beberapa tempat lainnya.⁸ Pengalaman pahit yang berkepanjangan inilah yang kemudian mendapatkan jalan keluar pada awal abad XX. Perkembangan ini bertambah pesat seiring dengan politik kolonial menjadi

⁷A.K. Pringgodigdo (1970), *Sejarah Perjuangan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat), hlm. 6.

⁸Alfian Ibrahim (1983), *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sumatera Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 83-92.

terbuka seperti dihapuskannya larangan untuk mengadakan perkumpulan, persidangan politik setelah dibukanya *Volksraad*. Dalam *Volksraad* kesempatan membicarakan soal-soal pemerintahan negeri, pertumbuhan lalu lintas dan persurat kabaran telah membuka ketertutupan yang selama ini membelenggu masyarakat.⁹

Berperannya kota Palembang sebagai pusat perlawanan dan perjuangan dapat dipahami. Sejak zaman kuno pemusatan penduduk ada di kota, Bandar, pusat pemujaan dan di persimpangan jalan.¹⁰ Perkembangan organisasi sosial dan politik sejak awal abad ke 20 menjadikan kota Palembang sebagai sumber timbulnya pejuang kemerdekaan. Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 tidak banyak pengaruhnya di Palembang. Budi Utomo lebih banyak pengikutnya di pulau Jawa, sedangkan Sareka Islam merupakan organisasi atau partai politik pertama yang memelopori tumbuh dan berkembangnya para pejuang di Palembang.

Dr. A. K Gani meskipun baru pindah ke Palembang pada pertengahan tahun 1941 beliau cepat dikenal oleh masyarakat Palembang. Dia adalah seorang ketua Gerindo dan ketua GAPI. Kehadirannya di Palembang setelah dia menyelesaikan sekolah dokternya di Jakarta dan akan membuka praktek di Palembang. A. K Gani telah meramalkan bahwa Jepang pasti menyerang Hindia Belanda dan wilayah yang lebih dulu diserangnya adalah wilayah yang mempunyai sumber minyak yaitu Palembang dan Balikpapan. Palembang adalah tempat penyulingan minyak yang terbesar di Asia.

Pada tanggal 12 Februari 1942, pesawat Sekutu memantau iringan armada Jepang yang sedang mendekati Singapore. Pada malam hari tanggal 13 Februari, armada Jepang sudah mendaratkan pasukannya di pulau Bangka, pangkalan untuk mengejar sasaran utama, Palembang. Palembang sudah diduduki pada tanggal 14 Februari, sebelum Singapore jatuh satu hari kemudian. Sedangkan daerah-daerah Sumatera yang lainnya baru sekitar minggu kedua bulan Maret. Akibatnya seperti diramalkan semula, ketika Jepang mendarat secara tiba-tiba di Palembang pada

⁹A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁰Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto (1984), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 20

hari pertama, Sabtu tanggal 14 Februari 1942, pertahanan KNIL Belanda di Palembang di buat kocar-kacir dan tidak dalam keadaan siap tempur. Satu hari kemudian Palembang dapat dikuasai sepenuhnya. Perintah politik bumi hangus diinstruksikan dari Jawa sebelum pendaratan Jepang ke Palembang menjadi berantakan. Hanya satu dari dua instalasi minyak terpenting di Palembang yang sempat dibinasakan, yaitu Sungai Gerong sedangkan Plaju masih relatif utuh.

Setelah Palembang diserbu pada tanggal 14 Februari 1942, pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dengan jatuhnya Palembang sebagai sumber minyak, maka terbentuklah pulau Jawa sebagai basis bagi tentara Jepang. Guna menghadapi serangan ofensif Jepang tersebut dibangun komando gabungan oleh pihak sekutu yang disebut ABDACOM (*American British Dutch Australian Command*).

Residen Palembang Oranye mengeluh putus asa” Jepang telah mempermalukan kami lebih buruk dari kuli Jawa”. Nasib Residen Palembang masih baik, tidak semujur apa yang dialami oleh Residen Lampung G. W. Meindesma. Residen Bengkulu C. E. Maier akhirnya harus tewas ditangan Jepang. Mereka dituduh menghancurkan semua berkas dan dokumen Keresidenan, sehingga Jepang tidak dapat mengharapkan banyak dari Keresidenan tersebut. Sebaliknya Direktur perusahaan BAM (Bukit Asam Meijn) di Tanjung Enim lebih dulu memilih “hara-kiri” dengan melompat dari tambang dari pada berurusan dengan Jepang.

3. Jambi

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. perjalanan perjuangan Revolusi dari Rakyat Jambi serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembentukan organisasi militer di daerah Jambi¹¹ yang dipicu oleh kedatangan bala tentara Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat

¹¹ Bambang Suwondo, (1979), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikbud, hlm. 59.

Jambi sehingga menimbulkan keinginan rakyat untuk membentuk kekuatan militer pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia, Semangat nasionalisme berkoar di seluruh penjuru negeri Indonesia, tidak pandang bulu semua rakyat Indonesia ikut serta menikmati euforia rasa kemenangan atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia atas penjajahan Jepang. Begitu juga dengan daerah Jambi, daerah Jambi menerima berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah dr.A.K.Gani dari Palembang melalui telepon menyampaikan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada R. Sudarsono, pimpinan buruh di pertambangan minyak Jambi.¹²

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ini disambut gembira oleh masyarakat daerah Jambi yang kemudian membangunkan semangat patriotisme dikalangan pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan semua lapisan masyarakat daerah Jambi untuk terus mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Pasca diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para tokoh Nasional daerah Jambi segera melakukan pembentukan Badan-badan Perjuangan dan kelengkapan organisasi pemerintahan yang berfungsi sebagai wadah untuk mempertahankan kemerdekaan seperti pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Abunjani¹³ dan pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah Jambi yang diketuai oleh Maklam.

Bendera Merah Putih dikibarkan di puncak menara air oleh para pemuda Jambi, antara lain R. Hoesen, Akipo, dan Amin Aini. Sementara itu, Kantor Pengadilan Jepang (dekat RS. Thersia sekarang) beberapa pejuang, seperti Zuraida, Nuraini, Sri Rexeki, Nurlala, dan Nursiah menurunkan bendera Jepang (*Hinomaru*) dan menggantinya dengan menaikan bendera Merah Putih. Praktis pada 22 Agustus 1945 bendera Merah Putih berkibar di Jambi dan beberapa kota

¹² Dewan Pimpinan Cabang Legium Vetran RI (2009), *Penyusunan Pemerintah Sipil dan Kekuatan Bersenjata Tahun 1945-1949 Di Daerah Jambi*, (Jambi : Depdiknas), hlm. 13.

¹³ Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (1991), *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI (1945-1949) Di Provinsi Jambi*, (Jambi : CV.Majelis Raya Offset). hlm.15

lainnya di Keresidenan Jambi. Pada tanggal tersebut merupakan awal gerakan kemerdekaan Indonesia di Jambi, yaitu terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diketuai oleh Abunjani. API ini bertugas menjaga ketertiban, keamanan, membela, dan mempertahankan kemerdekaan.

Menindaklanjuti pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Badan Penolong Keluarga Perang (BPKKP) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di Jakarta, pada 25 Agustus 1945 terbentuklah KNI Jambi yang dilantik pada Oktober 1945. Selain mengetuai BKR, Abunjani juga ditunjuk mengetuai kelompok pemuda dari KNI. Pada 5 Oktober 1945 BKR diganti namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan komandannya Abunjani yang berpangkat Kolonel.

Pada 24 Juni 1946 TKR pun dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Jambi kesatuannya menjadi Resimen II Divisi II Jambi sebagai bagian dari Sumatera Selatan. Sebelumnya, pada 17 Juni 1946 diadakan penyempurnaan susunan Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Jambi yang diketuai Inu Kertapati dan Kolonel Abunjani sebagai wakil ketua. Residen II Divisi II pada 3 Juni 1947 dirubah lagi menjadi Resimen 43 Jambi dan terakhir menjadi Brigade Garuda Putih. Pada 10 September 1947 menyusul Agresi Belanda, Keresidenan Jambi dibentuk Komando Daerah Militer Jambi dengan komandannya Kolonel Abunjani dan wakilnya Letnan Kolonel Tituler R. Soedarsono. Komando Daerah Militer Jambi kemudian pada 1 Juni 1948 menjadi TNI Sub Teritorium Djambi (STD) sebagai bagian TNI Sub Komando Sumatera Selatan (Sub KOSS) dengan komandannya Kolonel Abunjani.

Dalam kedudukannya sebagai Komandan STD Jambi merangkap pimpinan Komando Daerah Militer Brigade Garuda Putih dipegang sejak Juni 1948 hingga Januari 1949. Adanya kebijakan rasionalisasi di kalangan TNI, pangkat Kolonel Abunjani diturunkan menjadi Letnan Kolonel. Walaupun demikian, Letnan Kolonel Abunjani tetap di militer dengan jabatan rangkap sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan khusus daerah Jambi, juga sebagai Komandan STD sampai pertengahan Januari 1950. Terhitung Februari

1950 Letnan Kolonel Abunjani mengundurkan diri dari TNI beralih profesi menjadi seorang pengusaha di Jambi dan Jakarta.

Salah satu peran Abunjani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungan untuk perjuangan. Usaha tersebut selain dapat membantu perjuangan Pemerintah Pusat, sewa-beli Pesawat Catalina (RI 05) sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan, juga memasok perlengkapan dan perbekalan pasukan dengan sistem barter komoditi lada, vanili, karet, dan lain-lain.

Peran yang perlu dicatat kepemimpinan Letnan Kolonel Abunjani adalah memindahkan pusat pemerintahan dan pertahanan militer saat serangan Belanda pada 29 Desember 1948. Bersama dengan Rd. Inu Kertapati dan M. Kamil mengungsi ke pedalaman, tetapi berhenti di Sengeti. Rd. Inu Kertapati kembali ke Jambi untuk menenangkan keluarga dan masyarakat kota Jambi oleh bombardir pesawat dan serangan tentara Belanda melalui Kenali Asam dan Palmerah. Pada 1 Januari 1949 terbitlah surat kuasa Residen Jambi Rd. Inu Kertapati kepada M. Kamil, Bupati Jambi Hilir untuk meneruskan Pemerintahan Darurat Keresidenan Jambi. Dalam rapat antara unsur pemerintah dan militer di Tebo menghasilkan keputusan bahwa H. Baksan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jambi Ulu sebagai Residen Pemerintah Darurat Keresidenan Jambi dan Pusat Komando Militer dipindahkan ke Bangko. Walaupun mengalami berbagai gempuran, perjuangan dan pemerintahan darurat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Deli Serdang (Sumatra Utara)

Di zaman Jepang. Serdang dikenal sebagai lumbung padi di mana tanah belukar dan tanah perkebunan dijadikan area pertanian. Untuk mengurus bahan makanan rakyat baginda menumbuhkanlah Kantor Distribusi Bahan Makanan yang mengontrol hasil padi rakyat dan kilang padi di seluruh Serdang. Oleh sebab itu wilayah Serdang termasuk yang paling aman dan tidak teraapat pemberontakan

rakyat petani seperti halnya pemberontakan petan; Kayo 'Guro-guro Aroan" di bulan Juni 1942 di Kerajaan Deli (Pancur Batu) dan Bulilir di Kerajaan Langkat.'

Sultan juga menganjurkan beberapa kerabat dan keluarga Orang Besarnya untuk mengikuti pendidikan kemiliteran Jepang, yang dirasa perlu di masa depan kelak. Tetapi meskipun di masa mudanya memandang kepada kemajuan Jepang, tidaklah berarti baginda bersimpati kepada penjajahan militerisme Jepang. Di dalam upacara resmi tidak pernah baginda mau tunduk ke arah timur (Tenno Heika). dan dengan alasan sudah tua dan sakit-sakitan beliau duduk saja di kursi. Memang pada akhir masa Jepang itu Sultan sudah berusia lebih 83 tahun sehingga praktis pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Putera Mahkota Rajih Anwar. Saat itu, Tengku Yafizham dan Serdang terpilih menjadi Ketua Umum "Persatoean Oelama Kerajaan-kerajaan Soematera Timoer", sedang kakaknya Tengku Dhamrah. duduk di dalam "Sumatera Tyo Sangi In".

Dalam kenyataannya Jepang mengadakan politik adu domba yang licin antara golongan kerajaan dengan golongan "pergerakan kemerdekaan" dan antara golongan ulama Syafei dari kerajaan-kerajaan dengan ulama "Mohammadiyah". Di mana saja Jepang memakai kedua golongan ini berdampingan. Kecurigaan dan iri mulai ditimbulkan politik adu domba licin dari Jepang ini antara ke dua belah pihak, yang nantinya bakal membawa akibat fatal di zaman masa pemulaan kemerdekaan itu. Tentara Sekutu sudah merencanakan akan mendarat di Sumatera Utara yang kaya minyak dan hasil perkebunan itu. Mereka akan berhadapan dengan inti Tentara ke-25 Jepang (Divisi Imperial Guards'Divisi Konoe-Daini) yang menjaga tambang-tambang minyak di Sumatera Utara Aceh. Rencana pendaratan itu sudah diputuskan di sekitar Agustus-September 1945. yang oleh Churchill disebut "Operation Culvonn". Jika itu kejadian, tentulah wilayah Aceh-Sumatera Timur akan jadi kancah peperangan yang hebat, karena Jepang menganggap wilayah itu masuk "The nuclear zone of the Empire's plans for the Southern Area"³², di mana wilayah itu akan dijadikan wilayah Jepang asli. Oleh sebab itu pusat latihan kader gerakan di bawah tanah untuk gerilya rakyat menghadapi pendaratan Sekutu kelak, yang diberi nama *TALAPETA* (Taman Latihan Pemuda Tani) dipusatkan di Serdang Hulu yaitu di Gunung Rintih di

tahun 194? Namanya terdengar sangat sederhana tetapi ia dibangun dan dipimpin langsung oleh ahli intelejen Jepang yang ditakuti Sekutu. Kapten Inoue Tetsuro. Kepala dan Tokoka (Polisi Rahasia Jepang), merangkap Sekretaris Gubernur Nakashima dan merangkap Bupati Deli Serdang (sampai Mei 1943). Semua pemuda-pemuda yang terpilih itu dilatih selaku pemimpin dari semua garis front terdepan.

Untuk persiapan. 1 regu "Anglo-Dutch Country Section" (ADCS) dari "Mountbatten' Force 136" telah dibentuk di Colombo awal 1945 dan dipimpin oleh Marinir Belanda Letnan Brondgeest dan didrop di Hulu Besitang (Langkat) Pada saat diumumkannya kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia maka mereka lalu muncul dari tempat persembunyiannya dan bergerak ke Medan dan membuka markas Belanda di Hotel De Boer (Hotel DHARMA DELI sekarang). Sementara itu mendarat pula rombongan Mayor Jacob di Medan yang diikuti oleh kedatangan Letnan Turk Westerling tanggal 14 September 1945 yang lalu membentuk group bersenjata dari kalangan orang-orang Indo. Menado dan Ambon ex-KNTL. dan bermarkas di Jalan Bali (Pension Wilhelmina)

Proklamasi 17 Agustus 1945 pada awalnya kurang ditanggapi serius di Medan. Masyarakat masih kebingungan dan hanya mendengar desas-desus saja di samping berita bahwa tentara Sekutu akan mendarat. Dr. Tengku Mansur. Ketua "Shu Sengi Kai" (DPR Sumatra Timur di masa Jepang) pada tanggal 25 Agustus mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat di rumahnya, antara lain Karim MS dan Mr. Yusuf, dan dikeluarkanlah pengumuman untuk menjaga keamanan dan membentuk panitia diketuai Sultan Langkat dan Dr. Mansur untuk menjelaskan kepada tentara Sekutu kelak mengapa diadakan selama ini kerjasama dengan Jepang. Panitia inilah kemudian didesas-desuskan oleh golongan kiri sebagai "*Comite Van Ontvangst* ' (Panitia Penyambut) kedatangan Belanda yang bertugas akan menangkapi orang-orang pergerakan kemerdekaan-*) Desas-desus inilah kemudian dijadikan seolah-olah fakta dan lalu dijadikan bukti tunggal untuk membenarkan dicetuskannya "Revolusi Sosial" terhadap Swapraja-swapraja pribumi di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946.